KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Rp 1,635 triliun segera dibagikan
Tanggal : Sabtu, 14 Februari 2015
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

Rp 1,635 Triliun Segera Dibagikan

Anggaran Seharusnya untuk Rakyat

JAKARTA, KOMPAS — Badan Urusan Rumah Tangga DPR segera merinci pembagian anggaran tambahan Rp 1,635 triliun. Sebanyak 560 anggota DPR akan menerima kucuran dana lagi berkat anggaran tambahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015.

Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional Taufik Kurniawan mengesahkan APBN-P 2015 menjadi undang-undang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/2) malam. Dengan alokasi tambahan tersebut, akumulasi anggaran DPR sepanjang 2015 mencapai Rp 5,192 triliun.

Wakil Ketua BURT dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dimyati Natakusumah menjelaskan, proses pembahasan rincian anggaran tambahan baru bisa dilakukan begitu APBN-P 2015 disahkan. "Alokasi anggaran itu belum bisa dibahas dengan rinci karena (APBN-P 2015) belum disahkan. Sejauh ini masih berupa usulan," ungkap Dimyati.

Sebelumnya, Wakil Ketua Banggar dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Said Abdullah mengatakan, dari tambahan anggaran senilai Rp 1,635 triliun itu akan dialokasikan sebanyak Rp 1 triliun untuk penggajian tenaga ahli. Sementara sisanya, Rp 635 miliar, untuk kebutuhan kesekretariatan DPR (*Kompas*, 11/2).

Pengajuan anggaran dari BURT ke Badan Anggaran (Banggar) DPR, ujar Dimyati, awalnya sebesar Rp 1,9 triliun dengan rincian alokasi yang sudah disiapkan. Kini, BURT harus merevisinya karena nilai anggaran tambahan yang disetujui hanya Rp 1,635 triliun.

Dimyati menambahkan, pembagian sebesar Rp 1 triliun dan Rp 635 miliar itu masih bisa berubah ke depannya. "Meski sudah disepakati di Banggar dengan pemerintah, teknis pengalokasiannya masih harus diatur BURT. Kami belum tahu berapa yang akan dibagikan kepada anggota Dewan dan berapa untuk kesekjenan," kata Dimyati.

Tambahan anggaran tersebut, ujarnya, akan diiringi pengawasan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Nanti dipertanggungjawabkan dan diaudit oleh BPK sampai setiap sen. Sistemnya bukan *lump sump*, tetapi sesuai pengeluaran yang bisa diaudit karena merupakan biaya nyata untuk tugas kedinasan," kata Dimyati.

Secara terpisah, anggota Banggar DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Johnny G Plate, mengatakan, tambahan Rp 1,635 triliun dapat dibagi untuk menggaji tenaga ahli dan biaya operasional rumah aspirasi. Pasalnya, kebutuhan akan rumah aspirasi dan tenaga ahli tambahan kini kian mendesak.

"Pekerjaan di daerah pemilihan menumpuk sehingga dibutuhkan tenaga ahli yang dibayar memadai," kata Johnny.

Menurut Direktur Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, seharusnya tambahan anggaran bagi DPR ini bisa dibatalkan sebelum disahkan. Apalagi pengawasan terhadap penggunaan anggaran itu belum tentu dapat dilakukan secara transparan oleh publik.

"Uang negara seharusnya untuk mewujudkan proyek bagi rakyat. Tambahan anggaran ini jumlahnya besar sekali. Jangan sampai pengelolaannya dimanipulasi," ujar Uchok. (AGE)